

Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nikmatul Masruroh¹, Ferdianto², Nelly Septya Agus Salim³, Nafiah Nur Andini⁴

nikmatul.masruroh82@uinkhas.ac.id¹, ferdian010902@gmail.com²,

sasnelly994@gmail.com³, nafiahandini@gmail.com⁴

^{1,2,3,4}UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstracts: *This service is a collaboration between students and lecturers of UIN KHAS Jember and BPKAD in creating an effective asset management model. This service aims to tabulate and reorganize the list of assets owned by the Jember Regency Government and aims to provide education to the public about regional assets. This is due to the existence of many Jember Government assets, so a systematic asset management process is needed. This service uses a collaborative method of two institutions, namely UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember together with BPKAD to manage assets in the Jember Regency Government. This service produces a systematic asset management model starting from planning, authorization and evaluation processes. as well as public understanding of local government assets.*

Keywords: asset management, Collaboration, systematic assets

Pendahuluan

Aset bagi suatu pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting (Kurama & Pangkey, 2022). Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, baik itu dibeli atau didapatkan melalui APBN ataupun sumber lain yang disahkan misalnya sumbangan, wakaf, hibah atau sumber lain yang sesuai dengan aturan (Rahayu, 2021). Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan bahwa aset daerah merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan diberdayakan oleh pemerintah daerah akibat peristiwa masa lalu dan bisa dimanfaatkan untuk masa depan masyarakat (Kurama & Pangkey, 2022). Aset harus bisa diukur dengan uang dan bisa digunakan untuk masyarakat umum (Oemar & Gangga, 2017).

Aset daerah tentu membutuhkan pengelolaan yang baik, sistematis, transparan dan akuntabel (Rahayu, 2021). Maka aset daerah ini seharusnya dikelola secara tertib dan tercatat dengan sistematis (Aituarauw, 2021). Namun permasalahannya masih terdapat aset yang

belum dibulasi disebabkan oleh permasalahan ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan aset daerah. Permasalahan ini juga dialami oleh BPKAD Jember. Transformasi digital juga belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan SDM, sehingga aset daerah belum terdata secara maksimal. Permasalahan seperti ini diperkuat juga dengan peristiwa kepemilikan tanah milik pemerintah daerah yang berada di tangan masyarakat secara illegal. Peristiwa seperti ini menjadi catatan bahwa pengelolaan aset yang dilakukan oleh BPKAD belum maksimal. Sehingga mengakibatkan pemanfaatan yang tidak maksimal.

Permasalahan tersebut yang menyebabkan diperlukan kolaborasi antara dua lembaga untuk melakukan pencatatan dan mentabulasi ulang aset dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan aset pemerintah daerah, misal terkait tanah yang sudah terlanjur ditempati dan aset daerah yang terlanjut dikuasai. Dalam hal ini dilakukan pendampingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga aset daerah, sehingga masyarakat juga tidak seenaknya dalam menggunakan aset daerah. Maka pengabdian ini memiliki tujuan melakukan tabulasi dan merapikan kembali daftar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan memberikan wawasan tentang aset daerah agar masyarakat memahami terkait pengelolaan aset daerah.

Pengabdian model seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Agil Novriansa et.al (2023) yaitu melakukan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Objek yang digunakan yaitu para perangkat desa. Metode yang digunakan yaitu simulasi, ceramah, diskusi dan FGD. Pengabdian ini menghasilkan pemahaman materi oleh aparatur desa sehingga pengelolaan aset daerah menjadi lebih baik. Pengabdian ini memiliki perbedaan dari sisi metode dan skala pengabdian (Novriansa et al., 2023) . Dalam skala pembahasan pengabdian Novriansa et.al skalanya pada aparatur pemerintah, sedangkan pengabdian ini lebih pada kolaborasi dan edukasi kepada Masyarakat kabupaten Jember. Artikel yang ditulis oleh R Ait Novatiani et.al (2023) tentang kualitas pengelolaan aset desa, secara pembahasan ini memiliki perbedaan mendasar, yaitu lebih menekankan pada kajian aset desa dan kualitas pengelolaan aset desa (R Ait Novatiani et al., 2023). Sedangkan pengabdian ini lebih membahas tentang aset desa. Kajian serupa juga dilakukan oleh Arifin A et.al tentang optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah dengan pengawasan dan

pengendalian. Dikaji secara kuantitatif dengan variabel mediasi pemerintah daerah (Arifin et al., 2023). Artikel ini memiliki perbedaan tidak hanya dari segi metodologi dan variabel tetapi juga kajian yang dilakukan. Pengabdian ini lebih pada memberikan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kajian teoritik di atas, pengabdian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat umum. Selama ini, masyarakat belum paham bahkan belum tahu tentang aset daerah baik dalam bentuknya maupun jumlahnya. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menuntut adanya keterbukaan pemerintah kepada rakyatnya, maka dari itu sebagai pihak mitra, mahasiswa dan dosen sebagai patner dalam menyusun pengelolaan aset serta mensosialisasikannya kepada masyarakat (Puspita & Tanjaya, 2022). Sehingga tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk mentabulasi dan merapikan kembali daftar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aset daerah.

Metode

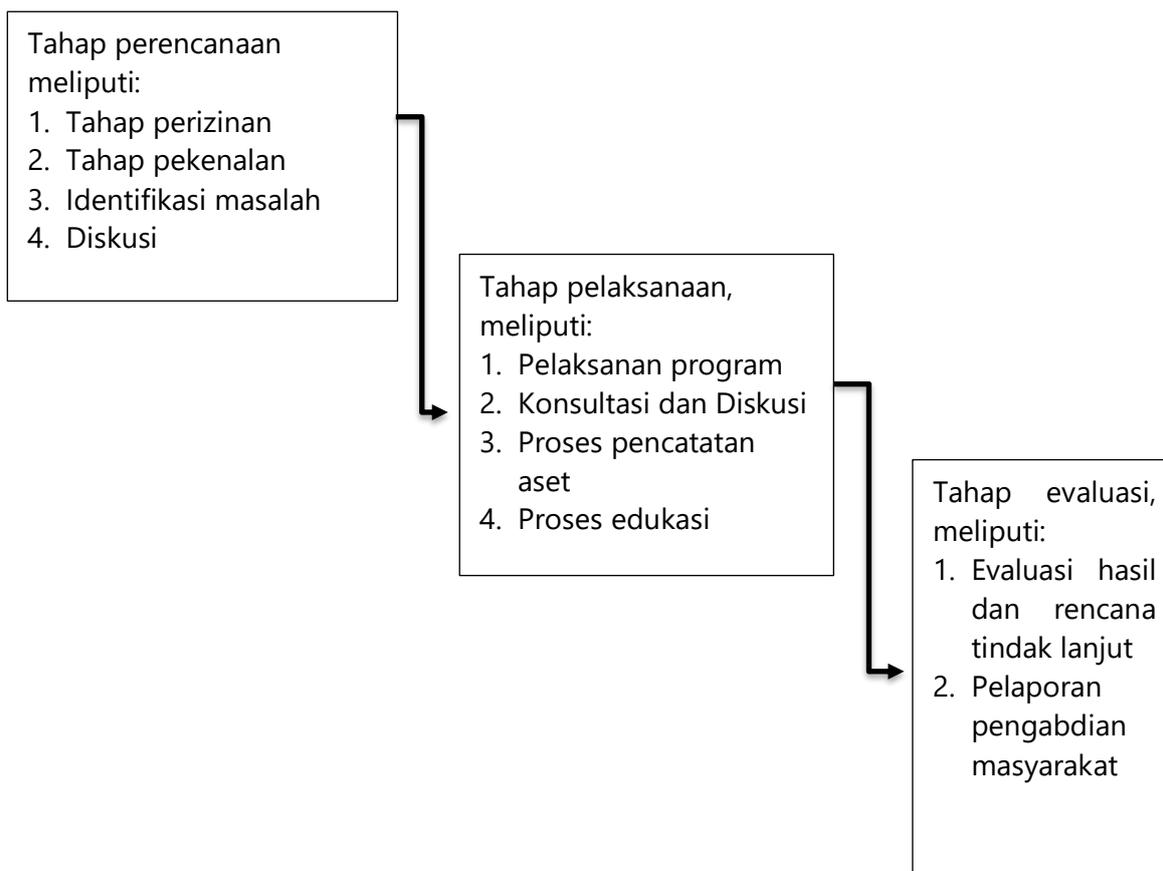
Pengabdian kolaboratif ini memiliki metode *service learning*, yaitu metode pengabdian dengan memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat (Papadopoulos et al., 2024). Pengabdian ini merupakan bentuk kolaborasi antara Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan BPKAD Jember. Pelaksana kegiatan ini mahasiswa dan dosen bersama dengan pihak BPKAD bagian pengelolaan aset daerah. Pendampingan berupa edukasi kepada masyarakat melalui pembuatan website yang berisi tentang pengelolaan aset serta pengadaan lelang. Selain *service learning*, metode kolaboratif juga digunakan dalam pengabdian ini karena karena pengabdian ini melibatkan kerjasama dua pihak yaitu BPAKD dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam pengabdian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

Tabel 1 tahap proses pengabdian kolaboratif

No	Tahapan	Aksi
1	Tahap perizinan	Tim dari FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melakukan perizinan untuk melakukan pengabdian kolaborasi bersama dengan BPKAD Jember
2	Tahap pengenalan	Tim yang terdiri dari satu dosen dan 3 mahasiswa dari FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melakukan pengenalan dengan pihak BPKAD Jember
3	Penempatan objek pengabdian	BPKAD memberikan tempat untuk kolaborasi pengabdian pada bagian pengelolaan aset
4	Identifikasi masalah	Tim bersama pihak BPKAD bagian pengelolaan aset mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, ternyata selama ini aset daerah belum tersosialisasikan dengan baik
5	Diskusi	Melakukan diskusi untuk memberikan solusi pada masalah tersebut. Sehingga disepakati adanya kegiatan kolaborasi dalam pentabulasian aset serta adanya edukasi terkait aset daerah sementara melalui website dan keberadaan lelang.
6	Pelaksanaan Program	Berdasarkan hasil diskusi, tim dari FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melakukan pencatatan tentang aset daerah yang dikelola. Selain itu juga merapikan proses pengelolaan aset daerah dan membuat modul sosialisasi pada Masyarakat
7	Konsultasi dan Diskusi	Setelah berdiskusi, tim mengkonsultasikan hasil yang dikukan tersebut kepada pihak BPKAD. Kemudian hasilnya didiskusikan kembali
8	Proses pencatatan aset	Pada tahapan ini tim bersama BPKAD melakukan <i>coding</i> untuk aset-aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember
9	Proses edukasi	Tahapan berikutnya memberikan edukasi masyarakat tentang pemahaman aset daerah
10	Evaluasi hasil dan rencana tindak lanjut	Mendiskusikan kembali hasil kegiatan pengabdian dengan pihak BPKAD
11	Pelaporan pengabdian	Setelah semua proses dilakukan, maka tim membuat laporan pengabdian untuk lembaga masing-masing. Termasuk melaporkan seluruh rangkaian kegiatan selama pengabdian

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel di atas, bisa digambarkan dalam bentuk *flow chart* agar alur kegiatan ini mudah dipahami.



Gambar 1 proses pengabdian kolaboratif

Pembahasan

Pengelolaan Aset di BPKAD Jember dan Edukasi Kepada Masyarakat

Dalam melakukan pengelolaan aset sama dengan lembaga yang lain menggunakan konsep manajemen sebagaimana pengelolaan lembaga pada umumnya. Hanya saja, jika dalam manajemen unsur yang digunakan hanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi. Namun dalam pengelolaan aset ini ada beberap unsur yang ditambahkan. Sehingga pengelolaan aset terdiri dari:

Pertama, perencanaan: dalam pelaksanaannya perencanaan ini merupakan rancangan dalam penganggaran kebutuhan yang akan dimiliki. Perencanaan dalam pelaksanaannya merupakan kegiatan mendesain anggaran agar tepat sasaran, karena keberhasilan kegiatan tergantung dari kesiapan dalam perencanaan. Perencanaan ini dalam praktiknya lebih fokus pada penganggaran baik penganggaran kegiatan maupun pengadaan aset. *Kedua*, pengadaan: merupakan salah satu bentuk pengorganisasian, yaitu pengadaan aset dan

pengadaan barang lain yang dibutuhkan. *Ketiga*, penggunaan aset yang dimiliki. *Keempat*, pemanfaatan aset yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan kepentingan Bersama. *Kelima*, *pengamanan dan pemeliharaan*, ini kegiatan yang sering dilupakan, yaitu mengamankan aset dari penggunaan ilegal, karena belum ada gudang penyimpanan terutama untuk menyimpan aset daerah yang ditarik untuk dikarantina sebelum masa penghapusan dan pelelangan. Aset masih tersimpan di beberapa SKPD dan diidentifikasi hilang pada saat pengecekan kembali

Keenam, penilaian, kegiatan ini dilakukan untuk menilai kembali aset yang dimiliki, khususnya yang berada di daerah-daerah. *Ketujuh*, *pemusnahan*, proses ini dilakukan BPKAD sesuai aturan negara yang berlaku. Nilai mata uang mempengaruhi proses ini, karena nilai mata uang dalam masa pengadaan dan penghapusan memiliki nilai yang berbeda. *Kedelapan*, penghapusan, proses ini menjadi proses terakhir dalam siklus pengelolaan aset di BPKAD Jember. Proses dilakukan sesuai aturan yang ada dan dilakukan sesuai dengan aset yang rusak serta aset yang sudah tidak memiliki manfaat.

Pengelolaan aset akan maksimal jika dilakukan penata usahaan. Dalam hal ini, kami ikut melakukan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini, kegiatan ini dipilah sebagai berikut:

- a. Pembukuan. Kegiatan dikerjakan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D jalan, irigasi dan jaringan, Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap lainnya, Kartu Inventaris Barang (KIB) F konstruksi dan pengerjaan serta Kartu Inventaris Ruang (KIR). Dalam proses ini pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- b. Inventarisasi. Kegiatan ini merupakan pencatatan dan pembukuan aset-aset yang dimiliki oleh BPKAD Jember. Identifikasi dan inventarisasi dilakukan untuk mengklasifikasikan aset agar nanti lebih mudah dilakukan pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Inventarisasi ini meliputi kegiatan pencatatan, perhitungan, pengurusan, pelaksanaan, pengaturan dan pendataan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan setiap barang serta menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

c. Pelaporan dilakukan oleh pengguna barang dengan laporan semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepala daerah melalui pengelola. Dalam pelaporan SKPD dilakukan 5 tahunan. Laporan ini direkap sebagai bahan penyusunan rencana daerah

Berdasarkan proses pengelolaan yang dilakukan tersebut, kemudian disosialisasikan kepada Masyarakat, melalui SKPD yang dimiliki. Sosialisasi tersebut sebagaimana disampaikan di atas sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar memahami aset-aset yang dimiliki daerah serta memahami penggunaan dan pemanfaatannya. Edukasi kepada masyarakat juga dilakukan dalam rangka ikut menjaga aset daerah. Edukasi ini dilakukan melalui SKPD dan website yang dimiliki. Dalam hal ini, kami melakukan pendampingan dan bersama-sama melakukan proses edukasi tersebut. Jadi, setelah melakukan inventarisasi dan memasukkan tabulasi aset berdasarkan jenisnya, dibuat pelaporan dan disosialisasikan kepada Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Jember ini telah memenuhi unsur *Good Corporate Government (GCG)* pada bagian transparansi dan akuntabilitas (Hanisa Nezla Hendiyani & Nurleli, 2023). Dalam prinsip tersebut harus terpenuhi unsur-unsur keterbukaan, kejujuran, pencatatan dan kesesuaian (Masruroh, 2023; Syairozi et al., 2021). Dalam pengelolaan aset, terdapat kendala pada pengelolaan risiko yang belum terantisipasi dengan baik sehingga, hal ini bisa menjadi penghambat dalam perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah (Adiwuri & Nurleli, 2022). Risiko kehilangan, kerusakan dan risiko aset tidak bermanfaat menjadi risiko yang harus diantisipasi, maka diperlukan manajemen risiko yang jelas dalam pengamanan dan pengelolaan aset daerah. Sebagaimana dipaparkan di atas, belum memadainya gudang sebagai tempat penyimpanan aset, juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Lilianita & Muhlisin, 2019). Namun, dalam pelaporan harus tetap menggunakan prinsip tersebut agar diketahui aset yang sebenarnya. Berikut beberapa dokumentasi dalam kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan.



Gambar 1. Foto dokumentasi pengabdian

Kesimpulan

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa *pertama*, tabulasi dan merapikan kembali daftar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan dalam rangka mempermudah dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. *Kedua*, setelah mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat tentang pencatatan dan inventarisasi aset melalui SKPD dan web yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar aset pemerintah daerah tidak hilang, serta prosedur penggunaan bisa diketahui oleh publik. Berdasarkan pengabdian yang dilakukan, maka saran yang bisa diberikan yaitu perlu dilakukan manajemen resiko, khususnya pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan guna mengantisipasi jika ada risiko kehilangan dan kerusakan aset.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada pihak UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal ini pihak laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan izin dan tugas untuk melakukan pengabdian di BPKAD. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada BPKAD Jember yang telah menerima proses pengabdian ini dan telah melakukan bimbingan. Terimakasih juga disampaikan kepada masyarakat yang telah menjadi objek pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Adiwuri, D., & Nurleli. (2022). Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Lingkungan. *Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.670>
- Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 1(2). <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>

- <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998>
- Arifin, A., Perseveranda, M. E., Sia Niha, S., Manafe, H., Paulina Bibiana, R., & Man, S. (2023). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1438>
- Hanisa Nezla Hendiyani, & Nurleli. (2023). Pengaruh Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan dan Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6507>
- Kurama, L. J., & Pangkey, M. (2022). Manajemen Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung Provinsi *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(117).
- Lilianita, D., & Muhlisin, S. (2019). Perbandingan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 5(1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1790>
- Masrurroh, N. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 467–476. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281>
- Novriansa, A., Muthia, F., Aryanto, A., & Wahyudi, T. (2023). Pengelolaan Aset Desa: Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.41565>
- Oemar, U., & Gangga, L. (2017). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Manyuasin. *Jurnal Ecoment Global*, 2(2). <https://doi.org/10.35908/jeg.v2i2.249>
- Papadopoulos, G., Bastas, A., Vouros, G. A., Crook, I., Andrienko, N., Andrienko, G., & Cordero, J. M. (2024). Deep Reinforcement Learning In Service Of Air Traffic Controllers To Resolve Tactical Conflicts. *Expert Systems with Applications*, 236. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121234>
- Puspita, D. A., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Good Corporate Governance, Media Exposure, Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Bulletin of Management and Business*, 3(1).
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Sarumpet, T. L., & Robertus Ary Novianto. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.492>
- Rahayu, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Di Pemerintah Kabupaten Lebak. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 11(1). <https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1420>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*.

